

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA LABUHAN SUMBAWA

Binar Dwiyanto Pamungkas^{1*}, Erwin Ramdani²

^{1,2}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: binardwiyantopamungkas@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 11 November 2024 Revised: 06 Desember 2024 Published: 31 Desember 2024	<i>The aim of this study was to know the strategies of waste management communities-based in Labuhan Sumbawa Village. This type of research is descriptive research. The data source in this research is primary data. The number of respondents is 30 respondents consisting of bureaucrats, academics and the community. The method used to collect data is by using interviews and documentation. The data analysis tool is by using the Analytic Hierarchy Process (AHP) with the help of expert choice (EC) applications. The results of the study showed that the priority strategies of waste management communities-based in Labuhan Sumbawa village were: 1) Budget, 2) Regulations, 3) Institutions, 4) Infrastructure. The budget placed in the first position in this study means that there were funding support for all activities related to waste management communities-based in Labuhan Sumbawa village, either from the regional, village or third parties in the communities because cleanliness funding was long investment that was able to encourage change in waste management Labuhan Sumbawa village.</i>
Keywords Strategy Analysis; Waste Management; Community Based.	

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan bagian yang sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan adalah meningkatnya volume sampah yang sebanding dengan tingkat konsumsi barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat penggunaan barang bisa memicu terjadinya peningkatan sampah sehingga menimbulkan kualitas lingkungan menjadi kurang baik. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebuah keharusan yang perlu ditanamkan pada masyarakat. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, salah satu contohnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya (Khoiriyah, 2021).

Kehidupan manusia sebagian besar menghasilkan jumlah sampah berasal dari aktivitas industri, seperti konsumsi, pertambangan, dan manufaktur. Sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga) yang sudah tidak terpakai. Menurut Makmum (2019), sampah merupakan material sisa yang berasal dari hewan, manusia, maupun tumbuh-tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Seiring berjalannya waktu, hampir semua produk industri akan menjadi sampah.

Sampah merupakan bahan padat bangunan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, atau aktivitas manusia lainnya. Sampah juga berasal dari puing-puing bahan bangunan dan besi-besi kendaraan bermotor. Selain itu, sampah juga bisa berasal dari berbagai tempat dipemukiman penduduk, seperti sampah keluarga yang tinggal di rumah. Jenis sampah yang dihasilkan tersebut, yaitu sampah organik yang berasal dari sisa buah, sayuran, dan makanan, sampah tersebut memiliki sifat mudah untuk terurai. Sedangkan sampah Anorganik berasal dari barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan, seperti plastik, kaca, karet, logam, yang bersifat sangat sulit untuk terurai (Muliadi, *et al.*, 2022).

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah menjadi konsekuensi adanya aktivitas manusia yang meningkat dalam menghasilkan buangan. Di sisi lain tidak semua sampah yang di buang akan mudah hancur butuh waktu berbulan-bulan dan bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun baru bisa hancur. Akibatnya jika volume sampah yang dihasilkan warga banyak, maka akan menyebabkan terjadinya penumpukan sampah yang tinggi sehingga dibutuhkan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang cukup luas (Sari, *et al.*, 2023).

Timbunan sampah ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari masalah kesehatan hingga masalah lingkungan, seperti pencemaran udara, air dan tanah. Meningkatnya pertumbuhan sampah ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat menyebabkan munculnya sampah semakin tinggi, sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, serta program pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) berbasis masyarakat belum berjalan dengan baik (Supianor, *et al.*, 2020).

Persoalan sampah tidak henti-hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Seiring berkembangannya produksi sampah yang mengalami peningkatan cukup tajam setiap harinya, maka diperlukan upaya dari semua unsur dalam penanganan dan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggungjawab dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Kegiatan pengurangan sampah ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas dapat melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*) sudah saatnya ditinggalkan karena tidak lagi efektif dan hanya sekedar memindahkan masalah dari rumah ke TPA saja. Sudah saatnya pengelolaan sampah dilakukan menggunakan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir (Saputro, 2020).

Permasalahan sampah erat sekali kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, sebab masyarakatlah yang merupakan sumber utama sampah itu sendiri. Mengatasi permasalahan sampah dari sumbernya akan menjadikan permasalahan sampah menjadi lebih sederhana. Di tengah kesulitan dan keterbatasan pemerintah dalam hal penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia untuk pengelolaan sampah, maka peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi aspek yang sangat penting. Pengelolaan sampah akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

Penanggulangan sampah bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun juga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam menangani masalah secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungannya, salah satunya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya serta peran serta masyarakat mengurangi pertumbuhan volume sampah, seperti mengurangi pemakaian plastik, mengurangi pemakaian alat-alat yang terbuat dari aluminium, dan bahan-bahan lainnya yang membutuhkan waktu lama dalam penguraiannya (Nugraha, *et al.*, 2018).

Ketentuan mengenai implementasi program pengelolaan sampah berbasis masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Program ini merupakan hasil karya Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai inovasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Melalui program ini diharapkan mampu menjawab persoalan masalah sampah serta sebagai terobosan baru melalui keterlibatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah perkotaan yang terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Sampah harus ditangani secara komprehensif mulai dari hulu, sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Untuk itu, peran aktif masyarakat atau individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif dalam mengelola sampah seperti pengumpulan, pewadahan, pemilahan dan melakukan daur ulang sampah untuk mengurangi volume dan persebaran sampah.

Perilaku masyarakatnya berbeda-beda disetiap daerah, begitu juga dengan penanganan sampah. Dalam konteks penelitian ini, jumlah sampah yang dihasilkan di Desa Labuhan Sumbawa semakin bertambah seiring meningkatnya tingkat perekonomian dan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak diimbangi dengan upaya penangan yang baik sehingga menyebabkan penumpukan sampah yang semakin tinggi. Timbunan sampah terus bertambah setiap harinya, baik jumlah maupun variasinya jika tidak dikelola secara baik maka akan menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan.

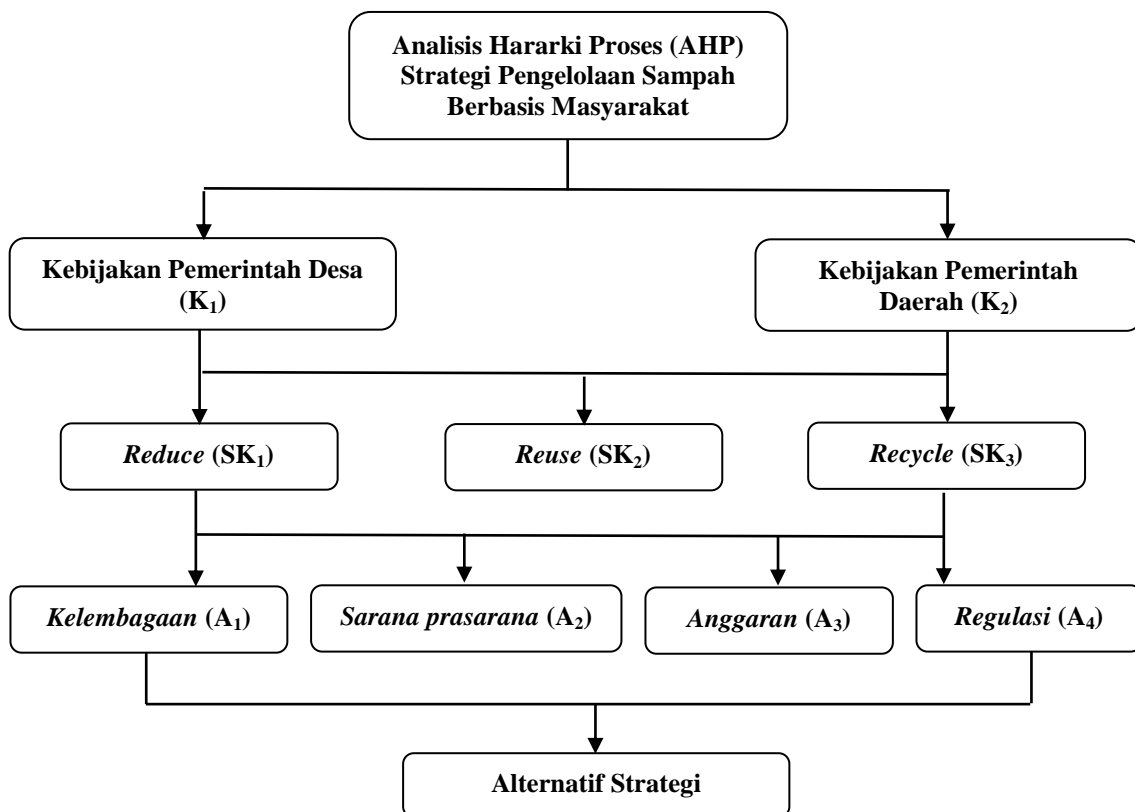
Selain pengelolaan sampah di Desa Labuhan Sumbawa yang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, penanganan sampah masih bertumpu pada pemerintah terlihat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Potensi sampah juga masih belum banyak diketahui oleh masyarakat yang sebenarnya merupakan potensi usaha bagi masyarakat dengan pengolahan yang tepat guna sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan realita tersebut, maka diperlukan strategi pengelolaan yang tepat untuk mengatasi masalah penumpukan sampah yang selama ini menjadi penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa. Melalui strategi pengelolaan yang tepat diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan sampah dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk berguna sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Rukajat (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan faktor-faktor strategi terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap teori dan hasil empiris, maka dapat disusun model konseptual penelitian dalam digambarkan berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data kuantitatif dalam penelitian merupakan data hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang diangkakan (*Scoring*). Data skor yang digunakan berupa skala likert dengan interval skor 1-9.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut Arikunto (2020), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya/pertamanya tanpa melalui perantara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden penelitian menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner.

Responden Penelitian

Penentuan narasumber penelitian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh responden yang representatif (mewakili) sesuai keadaan populasi yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode *sampling* dengan teknik *purposive*. Menurut Notoatmodjo (2018), teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi. Alasan penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun pemilihan responden didasarkan atas pertimbangan bahwa responden memiliki informasi yang mendalam berkaitan dengan objek yang akan dikaji dalam penelitian. Dengan demikian, maka ditentukan responden untuk penelitian ini terdiri atas tiga unsur, yaitu birokrat, akademisi, dan masyarakat. Jumlah total responden yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini adalah sebanyak 30 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian, peneliti menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sujarweni (2020), kuesioner merupakan suatu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada para responden untuk mereka jawab. Dalam penelitian ini, kuesioner diukur menggunakan *skala likert*. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang, atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, variabel yang akan diukur dijadikan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Pada penelitian ini, setiap alternative jawaban akan diberikan skor secara berpasangan dengan interval 1-9.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan menggunakan bantuan aplikasi *Expert Choice* (EC). Metode AHP merupakan teori umum mengenai pengukuran. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Saaty seorang ahli matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel dalam suatususunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas yang paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

Penyusunan kuisoner AHP bertujuan untuk menjaring pesepsi responden sebagai expert untuk menghasilkan data primer dalam proses indentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan yang dimiliki, dan pengalaman yang mereka miliki untuk masing-masing masalah yang dihadapi. Dengan kuisoner yang ada, reponden diharapkan mengisi sesuai interaksi faktor-faktor yang berkesinambungan didalam situasi yang kompleks. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Dengan metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas (Wulandari & Bulan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* digunakan peneliti untuk menentukan strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa. AHP dilakukan dalam beberapa tahapan, meliputi penentuan tingkat kepentingan masing-masing faktor kriteria, penentuan tingkat kepentingan antar masing-masing sub-kriteria berkaitan dengan faktor kriteria, penentuan tingkat kepentingan antar masing-masing alternatif kriteria berkaitan dengan sub-kriteria, dan penentuan strategi prioritas untuk dilaksanakan.

1. Menentukan Prioritas Faktor Kriteria

Pada penelitian ini, terdapat dua kriteria yang menjadi prioritas strategi untuk menentukan strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa, yaitu kebijakan pemerintah desa dan kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan data hasil rekapitulasi jawaban responden, diketahui bobot nilai masing-masing kriteria yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Bobot Kriteria

No	Kriteria	Priority Vector
1	Kebijakan Pemerintah Desa	0,533
2	Kebijakan Pemerintah Daerah	0,467
Consistency Ratio (CR)		0,000

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui bahwa kriteria yang menjadi prioritas pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa adalah Kebijakan Pemerintah Desa dengan nilai *priority vector* paling tinggi, yaitu sebesar 0,533 (53,30%). Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa merupakan prioritas strategi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui kebijakan pemerintah desa yang tepat diharapkan dapat mengurangi volume sampah serta potensi sampah dapat dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

2. Menentukan Prioritas Sub-Kriteria Berkaitan Dengan Faktor Kriteria

Pada tahap ini, dilakukan perhitungan untuk menentukan tingkat kepentingan antar masing-masing sub-kriteria pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa, yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan aplikasi *Expert Choice (EC)*, diketahui nilai *priority vector* sub-kriteria pada masing-masing faktor kriteria yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Bobot Sub-Kriteria

No	Kriteria	Sub-Kriteria	Priority Vector
1	Kebijakan Pemerintah Desa	Reduce	0,286
		Reuse	0,273
		Recycle	0,441
Consistency Ratio (CR)			0,002
2	Kebijakan Pemerintah Daerah	Reduce	0,281
		Reuse	0,269
		Recycle	0,450
Consistency Ratio (CR)			0,008

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui bobot nilai sub-kriteria *recycle* berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Desa merupakan prioritas strategi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa dengan nilai *priority vector* paling tinggi, yaitu sebesar 0,441 (44,1%). Demikian pula pada kriteria Kebijakan Pemerintah Daerah, program *recycle* menjadi sub-kriteria yang paling penting karena memiliki *priority vector* paling tinggi, yaitu sebesar 0,450 (45%). Hasil ini menunjukkan bahwa prioritas strategi dan kebijakan pemerintah desa dan daerah dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa diarahkan untuk mewujudkan program *recycle* (daur ulang sampah) yang merupakan program prioritas. Melalui program *recycle* ini, sampah dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat untuk menambah pendapatan.

3. Menentukan Prioritas Alternatif Kriteria Berkaitan Dengan Sub-Kriteria

Pada tahap ini, dilakukan perhitungan untuk menentukan tingkat kepentingan antar masing-masing alternatif kriteria pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa, yaitu kelembagaan, sarana prasarana, anggaran, dan regulasi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan aplikasi *Expert Choice* (EC), diketahui nilai *priority vector* alternatif kriteria pada masing-masing sub-kriteria yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Bobot Alternatif Kriteria

No	Sub-Kriteria	Alternatif Kriteria	Priority Vector
1	Reduce	Kelembagaan	0,239
		Sarana Prasarana	0,155
		Anggaran	0,327
		Regulasi	0,279
		Consistency Ratio (CR)	
2	Reuse	Kelembagaan	0,192
		Sarana Prasarana	0,194
		Anggaran	0,371
		Regulasi	0,243
		Consistency Ratio (CR)	
3	Recycle	Kelembagaan	0,199
		Sarana Prasarana	0,206
		Anggaran	0,288
		Regulasi	0,306
		Consistency Ratio (CR)	

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui bahwa anggaran merupakan alternatif kriteria yang paling penting dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa dengan nilai *priority vector* paling tinggi berkaitan dengan program *reduse* dan *reuse*, sedangkan nilai *priority vector* paling tinggi berkaitan dengan program *recycle* adalah regulasi dan menjadi alternatif kriteria prioritas. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran merupakan hal yang paling penting untuk mencapai tujuan *reduce* (mengurangi jumlah sampah) dan *reuse* (menggunakan kembali sampah) dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa. Sedangkan untuk mewujudkan program

recycle (daur ulang sampah) dibutuhkan regulasi sebagai pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa.

4. Menentukan Prioritas Strategi Untuk Dilaksanakan

Pada tahap ini, dilakukan rekapitulasi nilai keseluruhan alternatif kriteria berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya untuk menentukan prioritas strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa. Hasil rekapitulasi nilai keseluruhan alternatif kriteria disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Nilai Alternatif Kriteria

No	Kriteria	Priority Vector
1	Kelembagaan	0,209
2	Sarana Prasarana	0,189
3	Anggaran	0,318
4	Regulasi	0,284
Consistency Ratio (CR)		0,010

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui bahwa anggaran merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa dengan nilai *priority vector* paling tinggi, yaitu sebesar 0,318 (31,8%). Hasil ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari sampah, maka dibutuhkan anggaran yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa. Dengan adanya dukung anggaran yang memadai, maka akan dapat disusun perencanaan dengan lebih baik dan dapat memastikan segala sesuatu yang direncanakan dapat dijalankan sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa mampu dicapai secara optimal.

Pembahasan

Sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prioritas strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa berdasarkan tingkat kepentingannya adalah pertama anggaran, kedua regulasi, ketiga kelembagaan, dan yang keempat sarana prasarana.

Prioritas strategi yang pertama adalah anggaran. Untuk menjalankan segala kegiatan usaha tersebut agar lancar, maka membutuhkan dana untuk membiayainya. Dalam hal ini, anggaran merupakan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa, baik yang bersumber dari desa, daerah, maupun pihak ketiga yaitu masyarakat. Hal ini dikarenakan pendanaan kebersihan adalah investasi jangka panjang yang mampu mendorong perubahan dalam pengelolaan sampah di Desa Labuhan Sumbawa. Dengan adanya dukung anggaran yang memadai, maka akan dapat disusun perencanaan dengan lebih baik dan dapat memastikan segala sesuatu yang direncanakan dapat dijalankan sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa mampu dicapai secara optimal.

Hal ini sesuai dengan pandangan Mayarianty, *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa timbulan sampah tidak dapat dihentikan, akan tetapi harus dikelola, dikurangi atau diminimalisasi secara baik. Pengelolaan sampah harus secara efektif dan pada

umumnya, pengelolaan sampah memerlukan anggaran/biaya yang besar, terutama untuk biaya teknik operasional baik dari pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sementara (TPS) maupun pembuangan akhir (TPA).

Prioritas strategi yang kedua adalah regulasi. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan regulasi dalam strategi pengelolaan sampah tersebut berdasarkan norma dan standar. Regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan kebersihan dan menentukan tariff dasar pengelolaan kebersihan. Dengan adanya regulasi atau peraturan sebagai pedoman dan acuan, kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa dapat dilaksanakan dengan lancar karena ada payung hukum yang melindunginya.

Hal ini sesuai dengan pandangan Ahsanti, *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki aspek pengaturan kebijakan terkait pengelolaan sampah sehingga pemerintah telah memberikan arahan dalam koridor hukum terkait aksi pengelolaan sampah tersebut. Kebijakan tersebut merupakan landasan dan pedoman dalam pengelolaan sampah yang menekankan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Prioritas strategi yang ketiga adalah kelembagaan. Permasalahan sampah tidak bisa dipisahkan dengan peran kelembagaan, dengan adanya Kelembagaan organisasi/lembaga/pengelola yang menaungi kegiatan pengelolaan sampah yang memiliki struktur dan tanggung jawab yang jelas. Pengelola harus memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu menangani permasalahan pengelolaan sampah dengan baik di Desa Labuhan Sumbawa.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Damhuri dan Padmi (2019) yang menyebutkan Pengelolaan persampahan tidak dapat dipisahkan dengan peran kelembagaan. Pengelolaan sampah pada dasarnya melibatkan stakeholders. Dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R (*reduce*/mengurangi sampah untuk mencegah penimbunan, *reuse*/penggunaan kembali barang yang telah dipakai dan *recycle*/mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis), stakeholders terdiri dari masyarakat penghasil sampah, LSM, pihak swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki peran dalam pengelolaan persampahan.

Hal ini juga diperkuat dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraha, *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa adanya hubungan kelembagaan dalam pengelolaan sampah, kelembagaan sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan teknologi persampahan. Selain itu keberadaan kelembagaan juga sangat berubungan dengan pemanfaatan sampah, pengelolaan sampah, menjamin tersedianya sarana prasana persampahan serta memfasilitasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. dengan adanya hubungan kelembagaan dalam pengelolaan sampah akan mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah yang ada.

Prioritas strategi yang keempat adalah sarana prasarana. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah adalah bagian yang penting dalam menunjang terwujudnya pengelolaan persampahan yang baik. Sarana prasarana untuk pengelolaan sampah menjadi hal krusial agar semua dapat terproses dengan baik, diantaranya tempat pembuangan sementara (TPS) tempat pemrosesan akhir (TPA), tempat pengelolaan

sampah terpadu (TPST), bank sampah, truk pengangkut sampah, grobak dan lainnya, adanya sarana dan prasarana yang menunjang, mendukung kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa ini merupakan proses membangun kembali dan memperbaiki sarana dan prasarana menjadi lebih baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah & Mufidah (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah bukan suatu hal yang mudah, oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus dan penyediaan fasilitas penunjang dalam pengelolaan sampah. Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan sangat penting untuk mengatasi persoalan persampahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pengelolaan sampah, maka dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan pelayanan secara terencana dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah desa menjadi prioritas strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa, hal ini didasarkan pada nilai *priority vector* yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Program *recycle* menjadi prioritas strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa, baik dari aspek kebijakan pemerintah desa maupun kebijakan pemerintah daerah, hal ini didasarkan pada nilai *priority vector* yang lebih tinggi dibandingkan sub-kriteria lainnya.
3. Berkaitan dengan program *reduce* dan *reuse*, anggaran menjadi prioritas strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa, hal ini didasarkan pada nilai *priority vector* yang lebih tinggi dibandingkan alternatif kriteria lainnya.
4. Berkaitan dengan program *recycle*, regulasi menjadi prioritas strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa, hal ini didasarkan pada nilai *priority vector* yang lebih tinggi dibandingkan alternatif kriteria lainnya.
5. Hasil perhitungan kriteria AHP secara keseluruhan menunjukkan bahwa prioritas strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa berdasarkan tingkat kepentingannya adalah pertama anggaran, kedua regulasi, ketiga kelembagaan, dan yang keempat sarana prasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanti, A., Husen, A., & Samadi (2022). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim: Suatu Telaah Sistematis. *JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 11(1): 19-26.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Damhuri, E., & Padi, T. (2019). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: ITB Press.
- Khoiriyah, H. (2021). Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. *Indonesian Journal of Conservation*, 10(1): 13-20.

- Makmun, N. (2019). *Sahabat Sampah: Alam Bersahabat, Hidup Menjadi Nyaman*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Mayarianty, Mulki, G.Z., & Marsudi. (2018). Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*, 18(2): 1-8.
- Muliadi, Rukhayati, & Maisa. (2022). Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Tawaeli. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 35-38.
- Musdalifah, R., & Mufidah (2023). Ketersediaan Prasarana Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *UNIPLAN: Journal of Urban and Regional Planning*, 4(1): 37-43.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugraha, A., Sutjahjo, S.H., & Amin, A.A. (2018). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 8(1): 7-14.
- Nugraha, A.P., Hardjomidjojo, H., & Munandar, J.M. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mereduksi Sampah Rumah Tangga di Kota Bogor. *Jurnal Ecolab*, 14(1): 31-41.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saputro, A. (2020). Problematika Pengelolaan Sampah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 6(2): 46-58.
- Sari, C.N., Al-illahiyah, L.H., Kaban, L.B., Hasibuan, M.R., Nasution, R.H., & Sari, W.F. (2023). Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Dan Tantangan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo). *Journal of Human And Education*, 3(2): 268-276.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2020). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supianor, Arifin, J., & Suparti, H. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 3(2): 812-823.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Wulandari, R.E., & Bulan, S.J. (2019). Penerapan Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam Perangkingan Bengkel Mobil Terbaik Di Kota Kupang. *Jurnal Teknologi Terpadu*, 5(1): 13-17.